

PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENYELESAIAN LAPORAN (SIMPeL v.3.0) DI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

¹Tulus Pribadi, ²Syahrizal Dwi Putra*

^{1,2}Program Studi Teknik Informatika,

¹STMIK Jayakarta, ²Universitas Esa Unggul

*Correspondent Email : syahrizal.dwi@esaunggul.ac.id

Received: 28-06-2021, Revised: 05-07-2021, Accepted: 12-07-2021

Abstrak

Ombudsman RI merupakan Lembaga Negara yang bertugas mengawasi pelayanan publik berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan tugas tersebut Ombudsman RI melakukan pelayanan berupa penerimaan laporan/keluhan masyarakat terkait pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan yang harus diselesaikan dengan cepat dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Ombudsman RI harus memiliki Sistem Informasi yang dapat melakukan pencatatan dan proses penyelesaian laporan yang saling terintegrasi. Dengan mempertimbangkan besar dan kompleksitas pekerjaan di Ombudsman RI maka Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan ini harus direncanakan dengan baik dan berdasarkan dengan data – data yang dibutuhkan oleh masing – masing pengguna. Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan Masyarakat ini dibangun dengan pendekatan model enterprise architecture planning khususnya metode TOGAF ADM dengan harapan tersusunnya blueprint SIMPeL v3.0 dapat menjadi dasar untuk pembangunan Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL v3.0) di Ombudsman RI.

Kata kunci: Perancangan Arsitektur, *Architecture Enterprise*, Sistem Informasi, Ombudsman RI.

Abstract

The Indonesian Ombudsman is a State Institution tasked with overseeing public services based on Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia. Based on this task, the Ombudsman of the Republic of Indonesia performs services in the form of receiving reports / complaints from the public regarding public services performed by service providers that must be resolved quickly and efficiently. To achieve this goal, the Ombudsman of the Republic of Indonesia must have an integrated Information System that can record and complete the report completion process. Taking into account the magnitude and complexity of the work in the Ombudsman of the Republic of Indonesia, the Management Information System for Completion of this Report must be well planned and based on the data needed by each user. The Architecture of the Management Report Management Information System Completion of the Community Report was built using the enterprise architecture planning model approach, especially the TOGAF ADM method with the hope that the SIMPeL v3.0 blueprint can be the basis for the development of the Report Settlement Management Information System (SIMPeL v3.0) in the Ombudsman of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Architecture Design, Architecture Enterprise, Information Systems, Ombudsman of the Republic of Indonesia.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta>

1 Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, baik perorangan maupun instansi dibidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mempermudah dalam proses penyelesaian pekerjaan yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan data. Perangkat komputer sebagai perangkat pendukung manajemen dan pengolahan data adalah sangat tepat dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas data khususnya dalam pengelolaan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. (pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia) [1].

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 [2], mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja.

Salah satu tugas pokok Ombudsman Republik Indonesia adalah menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok tersebut, Ombudsman Republik Indonesia telah memiliki alat berupa aplikasi sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL). Akan tetapi dalam perjalanannya, prosedur penyelesaian laporan di Ombudsman Republik Indonesia telah mengalami banyak perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kinerja penyelesaian laporan. Salah satu contoh prosedur yang sedang dibahas adalah perubahan alur penyelesaian laporan yang memunculkan kebutuhan akan kemudahan mendapatkan informasi perkembangan penyelesaian laporan, dukungan mobilitas aplikasi di luar kantor dan sebagainya. Mengingat banyaknya perubahan dalam sistem yang perlu diakomodir dalam aplikasi, maka diperlukan pengembangan terhadap aplikasi SIMPeL dalam rangka meningkatkan kinerja penyelesaian laporan masyarakat [3].

Sesuai dengan laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2018, jumlah laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 8.314 laporan dan telah teregistrasi di aplikasi SIMPeL. Total laporan yang telah diselesaikan sebanyak 6.893 dari total laporan yang diterima sebanyak 8.314.

Saat ini aplikasi SIMPeL terdiri dari 2 (dua) versi yakni SIMPeL v1 (aplikasi pada saat tahap pemeriksaan laporan) dan SIMPeL v2.1 (aplikasi mengakomodir alur Penerimaan dan verifikasi Laporan). Penggunaan 2 (dua) database juga masih dilakukan, guna mengakomodir antara SIMPeL v.1.0 dan SIMPeL v2.1. Adanya 2 (dua) aplikasi yang berjalan terpisah dalam penyelesaian laporan masyarakat menjadikan alur penyelesaian tidak efisien.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk merancang Sistem Informasi Penyelesaian Laporan di Ombudsman Republik Indonesia untuk dijadikan solusi atas permasalahan yang terjadi saat ini.

Tujuan penelitian diperlukan agar penelitian ini dapat terukur dan terperinci sesuai dengan kebutuhan. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Merancang *Enterprise Architecture Planning (blueprint)* untuk Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan di Ombudsman Republik Indonesia.
2. Mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapat di perkuliahan dengan kenyataan yang sesungguhnya di lapangan.

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberi manfaat secara teoretis maupun praktis.



DOI: <https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489>

1) Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoretis adalah diharapkan mampu memperkaya teori – teori berkaitan dengan pengelolaan laporan atau pengaduan masyarakat, peraturan – peraturan terkait pelayanan publik, kendala – kendala yang dihadapi dan solusinya, maupun teori – teori berkaitan dengan pengelolaan laporan masyarakat.

2) Manfaat Praktis

Arsitektur Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan berbasis Web studi kasus di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yaitu sebagai solusi permasalahan dalam pengembangan Aplikasi Manajemen Penyelesaian Laporan masyarakat di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

2 Tinjauan Literatur (or Literature Review)

The Open Group Architecture Framework (TOGAF).

TOGAF merupakan sebuah *framework* untuk mengembangkan arsitektur perusahaan. TOGAF memiliki metode yang detail sekaligus *tools* pendukung untuk mengimplementasikannya. *Framework* ini dikeluarkan oleh *The Open Group's Architecture Framework* pada tahun 1995 (The-Open-Group, 2011) [4].

Pada perancangan ini akan menggunakan pendekatan *Enterprise Architecture Model* yang diturunkan dari kerangka kerja *The Open Group Architecture framework* (TOGAF) sebagai kerangka kerja penyusunan rancangan. TOGAF memiliki beberapa karakteristik, antara lain :

- a. Merupakan kerangka kerja yang bersifat open-standard.
- b. Bersifat netral.
- c. Diterima oleh masyarakat internasional secara luas.
- d. Pendekatannya bersifat menyeluruh (holistic).
- e. Memiliki alat – alat bantu (*tools*) untuk perencanaan dan proses yang lengkap.
- f. Fokus pada siklus implementasi (ADM) dan proses.

Pemilihan kerangka kerja ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa:

- a. Perlunya metode yang fleksibel dalam mengintegrasikan unit – unit informasi dan juga sistem informasi dengan platform dan standar yang berbeda – beda.
- b. TOGAF cenderung bersifat *generic* dan fleksibel sehingga dapat mengantisipasi segala macam artefak yang mungkin muncul dalam proses perancangan (*resource base* TOGAF menyediakan banyak material referensi), mampu mengatasi perubahan, dan standarnya diterima secara luas.
- c. Relative mudah diimplementasikan.
- d. Bersifat *open source*, sehingga bersifat netral terhadap teknologi dari vendor tertentu.

Architecture Development Method (ADM)

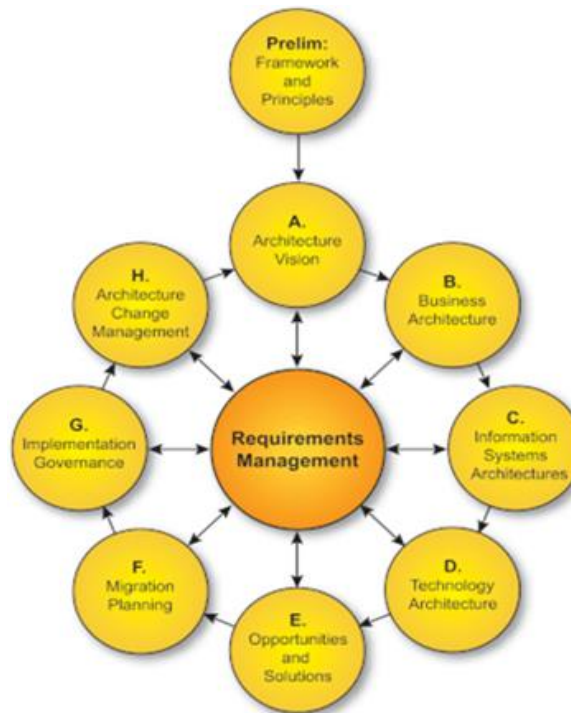
ADM merupakan inti dari TOGAF sebagai hasil kontribusi dari banyak praktisi arsitektur teknologi informasi di dunia. Secara spesifik ADM dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan teknologi informasi berskala enterprise. ADM menjelaskan bagaimana menemukan sebuah arsitektur organisasi secara khusus berdasarkan kebutuhan bisnisnya.

Dalam memandu proses perancangan, ADM memiliki 8 fase utama. Untuk lebih jelasnya, tahapan – tahapan pada ADM adalah sebagai berikut:



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta>



Gambar 1. Tahapan – Tahapan ADM [5]

Tahapan – tahapan kerangka kerja diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) *Preleiminary Phase : Framework and Principles*
Merupakan tahap persiapan dalam proses perancangan, dimana dilakukan penyusunan *framework* dan prinsip – prinsip arsitektur. Tujuan fase ini adalah untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat didalamnya bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur. Pada fase ini harus menspesifikasikan *who, what, why, when, dan where* dari arsitektur itu sendiri.
- 2) *Phase A : Architecture Vision*
Tahap ini merupakan tahap inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholders, penyusunan visi arsitektur dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur.
- 3) *Phase B : Business Architecture*
Tahap ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Pada tahap ini tools dan method umum untuk penodelan seperti *Integration Definition (IDEF)* dan *Unified Modeling Language (UML)* bisa digunakan untuk membangun model yang diperlukan.
- 4) *Phase C : Information System Architectures*
Tahapan ini lebih menekankan pada aktifitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi pada tahapan ini meliputi :
 - a. *Arsitektur Data (Data Architecture)*
Arsitektur data melakukan identifikasi entitas data, serta menggambarkan asosiasi data dengan proses dan skema data. Indentifikasi entitas data dilakukan berdasarkan arsitektur bisnis yang ada. Aliran informasi antar sistem didekomposisikan sebagai entitas data. Teknik yang bisa digunakan yaitu dengan *ER-diagram, Class Diagram, dan Object Diagram*.
 - b. *Arsitektur Aplikasi (Applications Architecture)*



Arsitektur aplikasi bertujuan untuk mendefinisikan jenis – jenis utama dari sistem aplikasi yang penting untuk memproses data dan mendukung bisnis. Pada tahap ini, arsitektur aplikasi diusulkan sesuai dengan kebutuhan.

5) *Phase D : Technology Architecture*

Tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun arsitektur teknologi yang akan dijadikan dasar pada saat implementasi. Pengembangan arsitektur teknologi ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu identifikasi arsitektur baseline, menentukan target arsitektur, dan melakukan gap analysis antara baseline dengan target. Dalam tahapan ini juga mempertimbangkan alternatif – alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi.

6) *Phase E : Opportunities and Solutions*

Pada tahap ini peluang – peluang bisnis baru dari arsitektur pada tahap – tahap sebelumnya yang mungkin muncul diidentifikasi. Hasil dari fase ini merupakan dasar dari rencana implementasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran rancangan arsitektur.

7) *Phase F : Migration Planning*

Pada tahap ini akan dilakukan analisis resiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan, biaya, manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi.

8) *Phase G : Implementation Governance*

Pada tahap ini mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Tujuan dari fase ini adalah untuk menyusun suatu tata laksana implementasi, termasuk menyusun dan menformalisasi tim, menyusun manajemen proyek, dan membuat suatu manajemen komunikasi dari proyek tersebut.

9) *Phase H : Architecture Change Management*

Tahapan ini mencakup penyusunan prosedur – prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana manajemen perubahan tersebut, dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur.

Foundation Architecture (Enterprise Continuum)

Merupakan sebuah “*framework-within-a-framework*” yang menyediakan hubungan bagi pengumpulan asset arsitektur yang relevan dan menyediakan bantuan petunjuk pada saat terjadinya perpindahan abstraksi level yang berbeda. *Foundation Architecture* terdiri dari :

- 1) *Technical Reference Model*, menyediakan sebuah model dan klasifikasi dari *platform* layanan generic.
- 2) *Standard Information Base*, menyediakan standar – standar dasar dari informasi.
- 3) *Building Block Information Base*, menyediakan blok – blok dasar informasi di masa yang akan datang.

Resource Base

Bagian ini memberikan sumber – sumber informasi berupa guidelines, templates, checklists, latar belakang informasi dan detail material pendukung yang membantu arsitek didalam penggunaan ADM.

3 Metode Penelitian

Sebelum memasuki tahapan kerangka kerja TOGAF ADM perlu adanya observasi dan wawancara untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di Bidang Keasistenan Pengendalian Mutu dan Bidang Keasistenan Inisiatif Strategis Ombudsman Republik Indonesia, Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan masih belum dapat digunakan secara efektif dan efisien dikarenakan adanya dua aplikasi yang berjalan terpisah di tahap penerimaan dan verifikasi laporan dan tahap pemeriksaan laporan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta>

Kendala yang dihadapi tersebut menyebabkan alur penyelesaian laporan masyarakat lebih panjang sehingga hasil penyelesaian laporan tidak sesuai dengan target instansi.

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode – metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrument. Instrument yang dimaksud yaitu kamera, pensil, ballpoint, dan buku. Kamera digunakan ketika peneliti melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto. Sedangkan pensil, ballpoint, dan buku gambar digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber. Instrumen yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan akses internet.

1. Observasi dilakukan oleh peneliti secara terbatas terhadap apa saja kegiatan yang dilakukan untuk menangani laporan masyarakat dan pedoman yang dilakukan untuk kegiatan tersebut.
2. Melalui wawancara, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan data atau sumber yang relevan dalam penelitian tersebut. Pertanyaan wawancara ini antara lain sebagai berikut :
 - a. Bagaimana latar belakang di banggunya Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan Masyarakat (SIMPeL) di Ombudsman Republik Indonesia?
 - b. Untuk sistem yang sudah berjalan apakah telah memenuhi kebutuhan terkait penyelesaian laporan masyarakat terkait pelayanan publik ke Ombudsman Republik Indonesia?
 - c. Siapa saja yang menangani langsung terkait laporan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia?
 - d. Bagian atau bidang apa saja yang mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL)?
 - e. Untuk saat ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian laporan masyarakat di Ombudsman Republik Indonesia?
3. Studi Kepustakaan digunakan untuk mencari data pendukung dari berbagai buku, ebook, maupun jurnal – jurnal yang relevan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan secara terbatas, peneliti mendapatkan data meliputi:

- a. Peraturan atau ketentuan – ketentuan yang dijadikan acuan untuk proses penyelesaian laporan di Ombudsman Republik Indonesia yaitu Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017.
- b. Pelaksanaan peraturan yang meliputi prakteknya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan unit keasistenan terkait dapat di simpulkan dengan tabel dibawah ini :

Tabel 1. Hasil Wawancara

Narasumber	Hasil Wawancara
Patnuaji Agus Indarto, SS (Kepala Keasistenan Manajemen Data dan Informasi Pengawasan Pelayanan Publik (MDIPP))	<ul style="list-style-type: none"> - SIMPeL dibangun dengan tujuan untuk mempermudah pencatatan laporan masyarakat ke Ombudsman RI dari proses awal sampai dengan proses akhir (munculnya rekomendasi) - Sangat perlu suatu perencanaan untuk melakukan pengembangan aplikasi SIMPeL yang sudah ada sehingga aplikasi yang sudah berjalan saat ini dapat terintegrasi menjadi satu aplikasi. - Dengan integrasinya SIMPeL v1.0 dan SIMPeL v2.0 seharusnya dapat memangkas waktu penyelesaian karena unit – unit terkait tidak melakukan dua kali pencatatan di dalam sistem, sehingga dapat fokus kepada solusi – solusi dalam penyelesaian laporan masyarakat.
Achmad Fauzi, S.Kom	Perlu adanya perencanaan terkait pengembangan dari sisi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta>

DOI: <https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489>

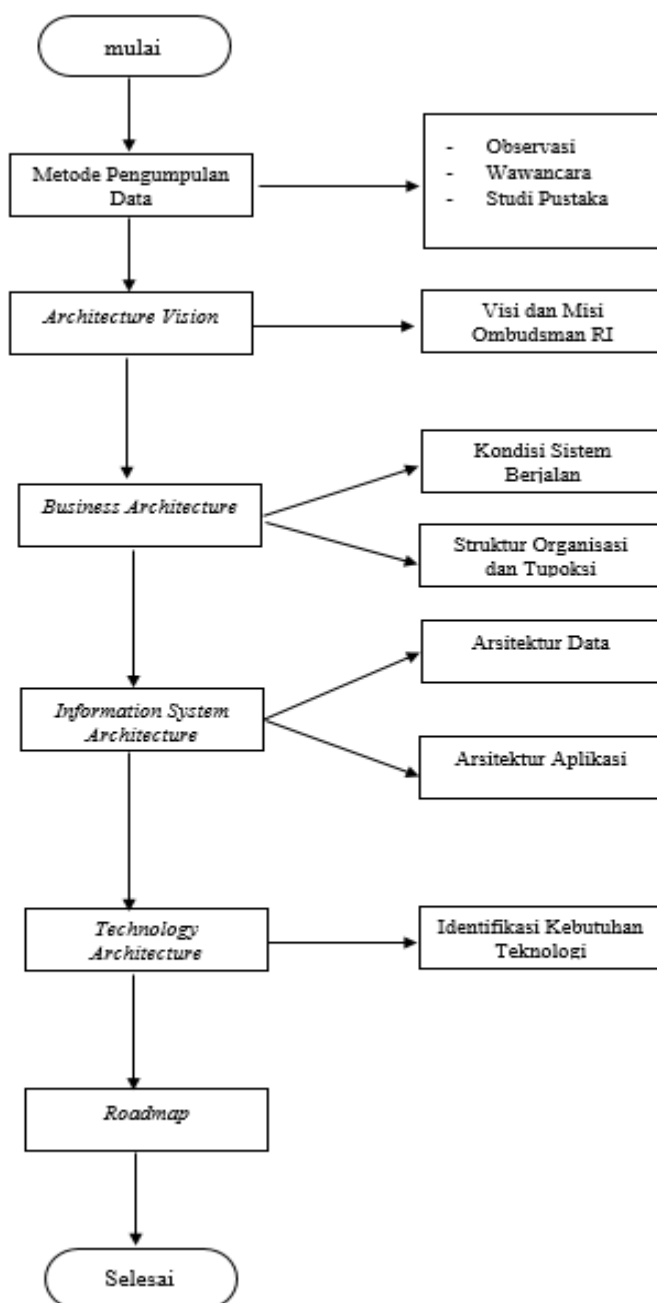
(admin SIMPeL)	Aplikasi, arsitektur bisnis, dan arsitektur teknologi.
Santi Wijayanti, S.I.P (Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL))	<ul style="list-style-type: none">- Perlu adanya pengembangan Sistem yang sedang berjalan, karena dengan bertambahnya kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik berimbas juga pada laporan yang diterima oleh Ombudsman RI, hal ini membuat tim keasistenan PVL harus cepat dalam melakukan pencatatan sehingga laporan masyarakat dapat tertangani dengan baik dan tentunya memuaskan pelapor dan terlapor.- Lama waktu untuk tindak lanjut laporan masyarakat mempunyai keragaman, akan tetapi jika mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik pasal 50 ayat 1 penyelenggara wajib memberikan tanggapan terhadap aduan maksimal 14 hari sejak laporan diterima.- Perlu ada perencanaan untuk penggabungan SIMPeL v0.1 dan SIMPeL v02 sehingga Kelompok Keasistenan PVL, Tim Pemeriksa, dan Kelompok Keasistenan Resolusi dan Monitoring dapat lebih menyatu karena tidak perlu melakukan pencatatan berulang yang pastinya dapat menggunakan waktu yang lebih efisien terhadap penanganan laporan masyarakat.

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan – permasalahan mengenai penyelesaian laporan di Ombudsman Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta>

DOI: <https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489>



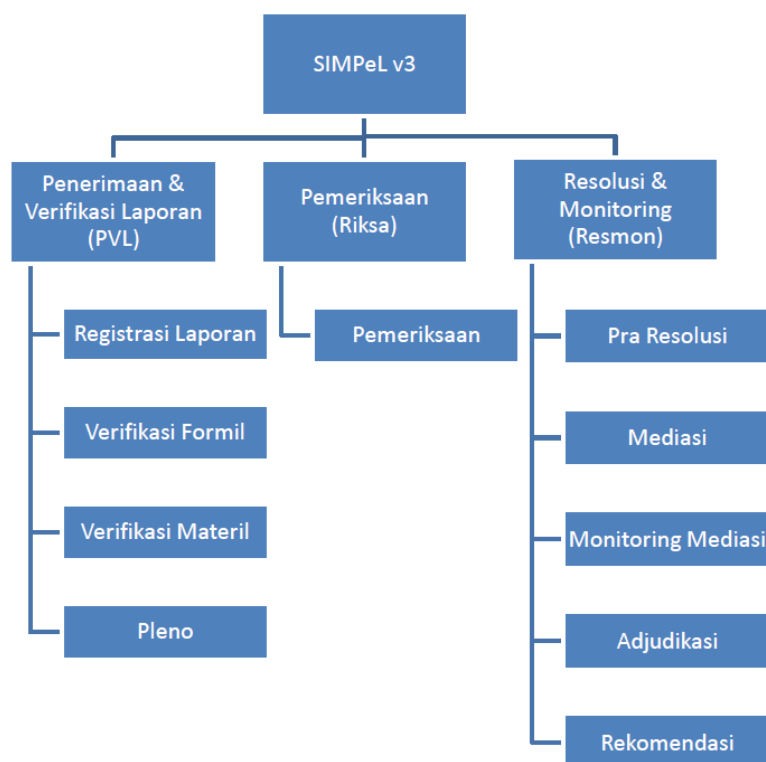
Gambar 2. Kerangka Pemikiran

4 Hasil dan Pembahasan

Rancangan Hirarki Input Proses Output/Struktur Proses dengan menggunakan HIPO (*Hierarchy plus Input-Proses-Output*) merupakan metodologi yang dikembangkan dan didukung oleh IBM yang sebenarnya adalah alat dokumentasi program.

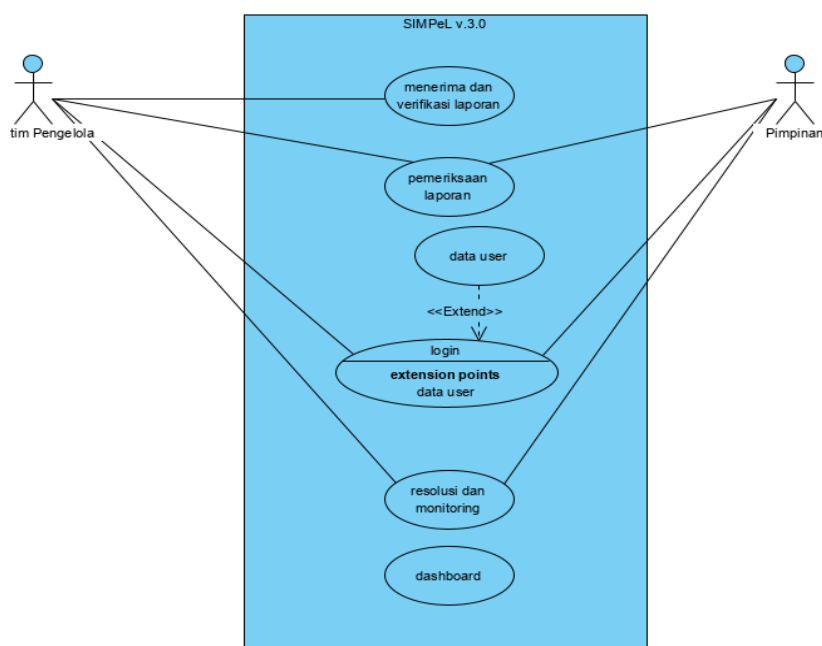


This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta>



Gambar 3. HIPO SIMPeL V3.0

Setelah dilakukan pengumpulan data kebutuhan dan studi literatur, peneliti dapat menghasilkan rancangan proses sebagai berikut :



Gambar 4. Use Case Diagram SIMPeL

Rencana Halaman *dashboard* yang menampilkan angka statistik dari jumlah sesuai dengan kondisi yang ada, seperti :



DOI: <https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489>

- Jumlah laporan masyarakat berdasarkan cara penyampaian.
- Jumlah pengaduan yang sedang diproses.
- Jumlah pengaduan masuk
- GIS



Gambar 5. Rancangan *dashboard*

Hasil pengujian dari Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPEL) v3.0 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Pengujian Perancangan Arsitektur

Bagian/Bidang	Hasil FGD
Kelompok Keasistenan	❖ Kebutuhan menu terkait resolusi dan monitoring telah terakomodir didalam perencanaan.
Inisiatif Strategis	❖ Perencanaan dapat diterima dan akan dilakukan evaluasi ulang sebelum dilakukan implementasi
Kelompok Keasistenan	❖ Kebutuhan menu terkait Penerimaan dan verifikasi laporan telah terakomodir didalam perencanaan.
Pengendalian Mutu	❖ Perencanaan Arsitektur Sistem Informasi dapat diterima dengan catatan dapat menyesuaikan kondisi yang akan berubah terkait proses penyelesaian laporan yang akan datang.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta>

Dari penelitian yang dilakukan terkait perancangan arsitektur sistem informasi manajemen penyelesaian laporan menggunakan metode TOGAF ADM di Ombudsman Republik Indonesia dapat dihasilkan rancangan sistem informasi manajemen penyelesaian laporan yang dapat mengintegrasikan SIMPeL v1.0 dengan SIMPeL v2.0.

Setelah dilakukan evaluasi dengan melakukan pengujian terhadap perancangan arsitektur sistem informasi manajemen penyelesaian laporan di Ombudsman Republik Indonesia dapat dipetakan dampak dari penelitian yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3. Hasil dan Solusi

Rencana Arsitektur	Dampak Positif	Dampak Negatif
Arsitektur proses	Aktifitas yang direncanakan bisa mengurangi waktu input data.	Sudah terbiasa dengan sistem sebelumnya sehingga perlu adaptasi kembali.
Arsitektur Data	Dapat mengintegrasikan data	Membutuhkan biaya yang sedikit lebih mahal untuk memelihara basis data yang lebih besar
Arsitektur Aplikasi	Penyelesaian laporan masyarakat dapat lebih efektif dan efisien dengan sistem baru yang diusulkan.	Dibutuhkan komitmen dari <i>brainware/user</i> untuk selalu melakukan pengisian data.
Arsitektur Teknologi	Teknologi yang diusulkan sesuai dengan jaringan komputer yang ada di Ombudsman RI	Dibutuhkan biaya yang besar untuk implementasinya.

Dari hasil pengujian dan pemetaan dampak dapat dikatakan bahwa Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan berpengaruh terhadap kebutuhan sistem informasi manajemen penyelesaian laporan yang lebih efektif dan efisien di Ombudsman Republik Indonesia, hanya saja untuk menerapkannya dibutuhkan komitmen dari semua unsur pengambil keputusan di Ombudsman RI karena diperlukan aturan – aturan dan juga biaya yang besar.

5 Kesimpulan

Penelitian tentang Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan v3.0 pada Ombudsman Republik Indonesia menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini membuat perancangan arsitektur sistem informasi manajemen penyelesaian laporan yang terintegrasi, sehingga lebih efisien untuk mempermudah administrasi atau pencatatan laporan masyarakat di Ombudsman Republik Indonesia dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM melalui empat tahapan melalui arsitektur visi, arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi dan arsitektur teknologi.
2. Dari penelitian yang dilakukan telah tersusun rancangan modul – modul yang dibutuhkan untuk Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL v3.0) di Ombudsman RI.
3. Penelitian ini hanya membuat rancangan arsitektur sistem informasi manajemen penyelesaian laporan pada Ombudsman Republik Indonesia..

6 References

- [1] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.”.
- [2] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.”.
- [3] P. Ombudsman, “Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata



DOI: <https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i3.489>

- Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.,” Ombusman, 2017.
- [4] The-Open-Group, “TOGAF® Version 9.1 . In Open Group Standard,” 2011.
- [5] F. T. a. A. R. Emanuel, “Perancangan Enterprise Architecture UNIPAS Morotai Menggunakan TOGAF ADM,” *teknika*, vol. 9, no. 1, pp. 1-8, 2020.
- [6] H. Tohari, Analisis Serta Perancangan Sistem Informasi Melalui Pendekatan UML, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- [7] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.”.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
<http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/JMIJayakarta>